

REKONSTRUKSI PROGRAM KELOMPOK KERJA GURU SD/MI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA

Moch. Tolchah
Universitas Islam Negeri Surabaya
Mochtolchah@gmail.com

Abstract

This study aims to describe: the working group program of Islamic religious education teachers in Tambaksari Sub-district of Surabaya City, the mechanism of program implementation, its effectiveness, the supporting and inhibiting factors, the ideal profile construction program according to the board, and the reconstruction of the working group of teachers of religious education of Islam. The approach used is qualitative. The subject is coach, clerk, and cluster coordinator. Data were collected by observation, interview, and documentation. Data were analyzed by Yin model. Result of research: (1) program of working group of Islamic religious education teacher formulated at the beginning of each year through deliberation of board, builder, and cluster representative. Work programs are grouped per field, covering areas of religious dissemination, training and development, fundraising and welfare, and public relations; (2) Mechanism: The coach conducts incidental guidance, the general chairman is responsible for the organization's performance to the members, the field leader and the cluster coordinator are responsible to the chairman; (3) The effectiveness of the implementation teacher working group program of the Islamic teacher education can not be known because the board has not evaluated the results, but seen from the program implementation until September 2017 about 70% of the program can be done. The unfinished program is the commemoration of the great Islamic days of Muharram and the Islamic race commemorate the Prophet's Mawlid, social care to the orphanage, the making of android learning media, Quran literacy training, comparative studies, visiting scholars, peer tutors, joint ventures; (4) Supporting Factors: the willingness of the board and members to advance, the ability and openness of the board, and continuous coaching. Inhibiting factors: minimal funds, solid teacher teaching hours, insufficient infrastructure, and lack of government support; (5) Ideal program of working group of Islamic religious education teachers according to the board includes routine and development programs. Routine programs at least: learning discussions, syllabus formation, semester programs, and lesson plans, curriculum analysis, preparation of evaluation instruments, and consolidation of national examinations. Development programs can be selected for at least three of these activities: research, scientific writing, seminars, workshops, research findings, panel discussions, journal publications, and website development; (6) The main points of reconstruction of the working group of teachers of Islamic religious education include the need for Vision and mission formulation, program objectives, routine and development programs in which each program is

formulated to facilitate the evaluation of its success and its implementation schedule.

Key Words: Reconstruction, working group program of teachers, Islamic religious education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: program KKG PAI di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, mekanisme pelaksanaan program, efektivitasnya, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, konstruksi profil ideal program menurut pengurus, dan rekonstruksi program KKG PAI. Pendekatan yang digunakan kualitatif. Subjeknya Pembina, Pengurus, dan koordinator gugus. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Yin. Hasil penelitian: (1) program KKG PAI dirumuskan setiap awal tahun melalui musyawarah pengurus, pembina, dan perwakilan gugus. Program kerja dikelompokkan per bidang, meliputi bidang dakwah, pelatihan dan pengembangan, penggalan dana dan kesejahteraan, dan bidang humas; (2) Mekanismenya: Pembina melakukan pembinaan secara insidental, ketua umum mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada anggota, ketua bidang dan koordinator gugus bertanggungjawab kepada ketua umum; (3) Efektivitas Pelaksanaan Program KKG PAI belum dapat diketahui karena pengurus KKG belum melakukan evaluasi hasil, namun dilihat dari keterlaksanaan program hingga September 2017 sekitar 70% program dapat terlaksana. Program yang belum terlaksana: PHBI kirab semarak Muharram dan lomba Islami memperingati Maulid Nabi, Bhakti sosial ke panti asuhan, pembuatan media pembelajaran android, pelatihan baca tulis Quran, studi banding KKG, silaturahmi ke tokoh, tutor teman sebaya, dan pembentukan koperasi KKG; (4) Faktor-faktor Pendukung: adanya kemauan pengurus dan anggota untuk maju, kemampuan dan keterbukaan pengurus, dan pembinaan yang kontinyu. Faktor penghambatnya: dana minim, jam mengajar guru padat, sarana-prasarana kurang, dan dukungan pemerintah kurang; (5) Program Ideal KKG menurut pengurus meliputi program rutin dan pengembangan. Program rutin sekurang-kurangnya: diskusi pembelajaran, penyusunan silabus, program semester, dan RPP, analisis kurikulum, penyusunan instrumen evaluasi, dan pemantapan menghadapi ujian nasional. Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan: penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, seminar, lokakarya, paparan hasil penelitian, diskusi panel, penerbitan jurnal, dan penyusunan *website*; (6) Pokok-pokok rekonstruksi program KKG meliputi perlunya rumusan Visi dan misi, tujuan program, program rutin dan pengembangan dimana setiap program dirumuskan tujuan untuk memudahkan evaluasi keberhasilannya dan jadwal kegiatan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Program Kelompok Kerja Guru, Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Persoalan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia masih saja mendapat sorotan meskipun berbagai upaya telah, sedang, dan akan tetap dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional. Rendahnya mutu pendidikan tersebut bukanlah sebuah opini belaka, tetapi didukung oleh data yang bisa diterima kebenarannya. Hasil studi UNDP (*United Nation and Development Program*) mengenai IPM (Indeks Pembangunan Indonesia) yang meliputi penilaian bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita, misalnya, menunjukkan bahwa peringkat Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1995, yaitu: tahun 1995 menduduki peringkat ke-104; tahun 2000 menduduki peringkat ke-109; tahun 2002 menduduki peringkat ke-110; dan tahun 2003 menduduki peringkat ke-112 dari 175 negara.¹ Lebih lanjut dikatakan pengalaman di beberapa negara yang telah maju menunjukkan bahwa pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsanya mampu menjadi lokomotif dalam pembangunan di segala bidang. Dengan pendidikan yang bermutu dan relevan, mampu dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga walaupun negaranya memiliki sumber daya alam yang terbatas, mereka mampu memajukan bangsanya, menyejahterakan rakyatnya, dan membangun daya saing bangsanya.

Gambaran rendahnya mutu pendidikan tersebut harus disikapi secara positif oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia, mulai pengelola pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal dengan berbagai ragam bentuknya. Sekolah Dasar merupakan sub sistem pendidikan nasional yang eksistensinya sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Setiap orang memahami bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar – termasuk pendidikan di sekolah dasar -- tidak mungkin seseorang dapat mengikuti tingkat pendidikan selanjutnya. Stoops dan Johnson, mengemukakan bahwa Sekolah Dasar merupakan dasar dari semua jenjang pendidikan berikutnya, dimana seorang anak didik mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ditentukan oleh keberhasilannya dalam mengikuti jenjang Sekolah Dasar.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang

¹Wayan Koster, *Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen* (Jakarta: tanpa penerbit, 2006),5.

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pendidikan menengah. Salah satu bentuk pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 6 tahun adalah Sekolah Dasar.²

Menyadari akan pentingnya lembaga pendidikan Sekolah Dasar dalam memberikan bekal kemampuan dan pengalaman dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, maka dibutuhkan pengelolaan Sekolah Dasar yang profesional. Untuk itu diperlukan sumber daya pengelola yang profesional, baik dalam pengelolaan peserta didik, sarana-prasarana, keuangan, kurikulum, maupun pengelolaan tenaga kependidikan terutama guru.

Guru sebagai tenaga pendidik sekaligus memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional dan sebagai aktor sentral yang berhubungan langsung dengan keberhasilan pendidikan. Brandt (1993)³ menjelaskan bahwa guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana, hanya akan berarti apabila melibatkan guru.

Guru Sekolah Dasar sebagai pionir dalam mensukseskan tujuan institusi harus mengikuti perkembangan zaman, sebab kebutuhan masyarakat tentang pendidikan juga terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu guru harus mampu mensejajarkan pengetahuannya dengan tuntutan zaman, dengan bekal pengetahuan yang *up to date* dengan tuntutan zaman, maka guru akan dapat membelajarkan peserta didiknya selaras dengan tuntutan zaman. Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus mengalir dengan sendirinya menjadi sebuah perhatian serius bagi pemerintah agar guru juga diberikan pembinaan profesional secara terus-menerus, sehingga guru tidak ketinggalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi.

²PP No. 8 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

³Dalam Fasli Jalal dan Dedy Supriadi (Ed). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001),42.

Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi sebagai seorang guru pada dasarnya adalah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas serta tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Hal itu merupakan konsekuensi logis bahwa guru adalah sebuah jabatan profesi. Oleh karenanya ia harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.⁴ Untuk itu guru dituntut agar selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Tugas dan tanggung jawab itu erat kaitanya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah kompetensi guru.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Seorang guru dikatakan profesional apabila kompetensi-kompetensi tersebut di atas diwujudkan dalam kinerja secara utuh, tepat dan efektif. Hal ini dikarenakan guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, menguasai metode yang

⁴ Sulipan. 2007. "Kegiatan Pengembangan Profesi Guru." Lihat di <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>, (diakses pada tanggal Juni 1, 2015).

⁵ Sudjana S, H.D. *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas* (Bandung: Falah Production, 2001), 16.

tepat, mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia sebagai landasan pola pikir dan pola kerja guru dan loyalitasnya kepada profesi pendidikan yang mampu mengembangkan budaya organisasi kelas, dan iklim organisasi pengajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 a). Untuk itulah profesionalisme guru harus terus dikembangkan.

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan profesional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Indikasi peningkatan profesionalisme guru dalam pembelajaran dapat diwujudkan melalui pemberdayaan potensi dan prestasi guru.

Upaya untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan luar sekolah. Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berperan untuk menjembatani terpenuhinya kebutuhan warga belajar bagi yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kerjanya.

Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualitas guru di Sekolah Dasar (SD) haruslah menjadi salah satu fokus perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme guru. Hal ini karena SD merupakan satuan pendidikan formal pertama yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan profesional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional harus bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru. Salah satu wadah peningkatan profesionalisme guru Sekolah Dasar adalah Kelompok Kerja Guru (KKG).

KKG adalah organisasi sekolah nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga lain. KKG mewadahi kegiatan profesional guru terutama yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas (sebagai guru kelas). Melalui wadah KKG diharapkan agar pembinaan dan pelatihan kemampuan profesional guru dapat dilaksanakan dengan optimal.

Wadah gugus sekolah dapat digunakan oleh para guru sebagai warga belajar pelatihan dalam KKG untuk: (1) menumbuhkembangkan semangat kerjasama, menginformasikan, dan menyebarluaskan perolehan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan serta gagasan baru tentang usaha peningkatan mutu pendidikan agar mempercepat arus pembaharuan pendidikan yang dibawah oleh guru sebagai anggota gugus dari penataran/pelatihan dan pembinaan baik ditingkat wilayah maupun tingkat pusat; (2) memberikan kesempatan kepada para guru yang kreatif dan inovatif untuk berbagai pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan profesional kepada sesama teman sejawat dan mendiskusikan bersama hasil karyanya untuk memperoleh yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan, gagasan baru, dan keterampilan masing-masing; (3) mendiskusikan dan merumuskan pemecahan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Sekolah Dasar, termasuk Madrasah Ibtidaiyah merupakan sub sistem pendidikan nasional yang eksistensinya sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Setiap orang memahami bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar – termasuk pendidikan di sekolah dasar tidak mungkin seseorang dapat mengikuti tingkat pendidikan selanjutnya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan mempersiapkan peserta didik dalam

mengikuti pendidikan menengah. Salah satu bentuk pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 6 tahun adalah Sekolah Dasar.⁶

Menyadari akan pentingnya lembaga pendidikan SD dalam memberikan bekal kemampuan dan pengalaman dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, maka dibutuhkan pengelolaan Sekolah Dasar yang profesional. Untuk itu diperlukan sumber daya pengelola yang profesional, baik dalam pengelolaan peserta didik, sarana-prasarana, keuangan, kurikulum, maupun pengelolaan tenaga kependidikan terutama guru.

Pengembangan profesional guru harus bertolak pada kebutuhan nyata guru. Salah satu wadah peningkatan profesionalisme guru SD adalah Kelompok Kerja Guru (KKG). KKG adalah organisasi sekolah nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga lain. KKG mewadahi kegiatan profesional guru terutama yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas. Melalui KKG diharapkan pembinaan dan pelatihan profesional guru dapat dilaksanakan dengan optimal.

Wadah gugus sekolah dapat digunakan guru untuk: (1) menumbuh kembangkan semangat kerjasama, menginformasikan, dan menyebarkan perolehan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan serta gagasan baru tentang usaha peningkatan mutu pendidikan agar mempercepat arus pembaharuan pendidikan yang dibawah oleh guru sebagai anggota gugus dari penataran/pelatihan dan pembinaan baik ditingkat wilayah maupun tingkat pusat; (2) memberikan kesempatan kepada para guru yang kreatif dan inovatif untuk berbagai pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan profesional kepada sesama teman sejawat dan mendiskusikan bersama hasil karyanya untuk memperoleh yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan, gagasan baru, dan keterampilan masing-masing; (3) mendiskusikan dan merumuskan pemecahan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Beberapa permasalahan yang dihadapi KKG: (1) masih minimnya minat anggota untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KKG; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang program KKG; (3) terbatasnya dana untuk mengadakan pelatihan ataupun pendidikan bagi anggota KKG; (4) masih minimnya tindak lanjut

⁶ PP No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

terhadap beberapa program yang telah dilaksanakan (setelah pelatihan selesai, anggota masih menerapkan metode pembelajaran yang konvensional); (5) anggota KKG masih belum menguasai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan belum mempunyai ketrampilan *Information Communication Technology (ICT)* sehingga wawasan anggota masih sangat terbatas.

Berbagai peningkatan profesionalisme guru, baik melalui berbagai diklat yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta, termasuk melalui KKG, ditengarai masih belum dapat meningkatkan kualitas guru, terutama guru SD. Hal itu diantaranya karena minimnya ketersediaan dana, belum tumbuhnya partisipasi aktif dari bawah, dan rendahnya kompetensi guru, terutama guru SD.⁷ Pendapat tersebut kiranya sesuai dengan kondisi empiris KKG secara umum, dimana kurangnya dana untuk kegiatan dan rendahnya partisipasi guru mengikuti kegiatan KKG menjadi penghambat pelaksanaan program KKG. Rendahnya kompetensi guru semestinya memotivasi guru untuk meningkatkannya melalui KKG.

Permasalahan yang dihadapi KKG juga diidentifikasi oleh Soemantri dan Ridwan,⁸ di antaranya: (1) belum semua KKG memiliki rencana kerja yang berbasis pada analisis kebutuhan peningkatan profesionalisme; (2) program KKG kurang relevan dengan kebutuhan penembangan profesionalitas guru-guru, (3) kurangnya dana pendukung operasional kegiatan KKG; (4) belum memadainya fasilitasi dari pemerintah daerah dalam menunjang kegiatan KKG; (5) Organisasi profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah kurang mendukung terlaksananya kegiatan KKG; dan (6) KKG kurang diberdayakan dalam rangka peningkatan kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, dan peningkatan mutu pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa KKG merupakan wadah pendidikan non formal sebagai upaya meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam mengelola pembelajaran di sekolah dasar. Dengan adanya KKG, diharapkan dapat memberikan keleluasaan terhadap pengelolaan proses pembelajaran di SD. Oleh karena itu, KKG di bawah naungan gugus sekolah perlu

⁷Fasli Jalal, *Hand-out Rembug Nasional* (Jakarta: Ditjen PMPTK, Depdiknas, 2007), 24.

⁸Manap Sumantri & Sa'adah Ridwan. "Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru SD/Midi Kabupaten Seluma". *Jurnal Kependidikan Triadik* 14, No.1 (April, 2011),19.

dikelola dengan baik, dikembangkan terus, dilaksanakan secara berkelanjutan, dan memperhatikan kalender pendidikan, memperhatikan kebutuhan dan permasalahan lapangan, serta keterpaduan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain saling menunjang sesuai tujuan dan komitmen bersama, sehingga KKG dapat berfungsi secara efektif.

Kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dengan KKG sangat diharapkan agar KKG dapat efektif. Guru sebagai anggota, tutor, guru pemandu mata pelajaran, dan pembina adalah personel yang harus memiliki kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan keefektifan KKG di gugusnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Tutor mempunyai tugas membantu teman sejawat (guru-guru), oleh karena itu dituntut menguasai seluruh mata pelajaran yang dibelajarkan di SD beserta variasi metode pembelajarannya. Guru Pemandu Mata Pelajaran (GPMP) mempunyai tugas membantu guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan serta mengevaluasinya untuk satu mata pelajaran tertentu yang menjadi keahliannya. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi yang dilakukan oleh pembina dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh pembina yang berasal dari pengawas TK/SD. Sedangkan guru sebagai anggota KKG dituntut untuk bersikap positif terhadap seluruh program KKG dan berpartisipasi aktif mengikuti seluruh program kerja KKG di gugusnya masing-masing.

Selain kepedulian personel yang tinggi, agar KKG efektif maka harus memiliki program kerja yang realistis. Program kerja yang realistis menggambarkan: (1) hal-hal yang akan dilakukan; (2) cara melakukan; (3) fasilitas yang diperlukan; (4) waktu pelaksanaan; dan (5) orang yang bertugas melaksanakan kegiatan. Program kerja tersebut dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil guru untuk meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam mengembangkan manajemen pembelajaran di sekolah.

Penelitian ini dilakukan di KKG Pendidikan Agama Islam (PAI) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang terdiri dari 6 gugus, yakni gugus Pacarkeling, Pacarkembang, Tambaksari, Ploso, Gadung, dan gugus Rangkah. Jumlah anggota seluruhnya ada 80 guru PAI SD/MI. Keberadaan gugus untuk KKG PAI sebatas untuk koordinasi, program kerjanya tersentral di tingkat Kecamatan. Oleh karena

itirekonstruksi program KKG PAI harus didasarkan pada program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari.

Berdasarkan data dari Ketua KKG PAI Kecamatan Tambaksari bahwa KKG PAI Kecamatan Tambaksari telah memiliki program kerja dan telah dilaksanakan dengan pertemuan rutin setiap hari Sabtu setelah jam pelajaran efektif selesai. Dalam penyusunan program belum seluruh guru anggota KKG PAI diminta untuk mengemukakan permasalahan yang perlu dibahas dalam KKG PAI, karena hanya koordinator guru PAI pada setiap gugus yang diberi kesempatan memberi masukan kepada Ketua KKG. Kendala yang dijumpai diantaranya: (1) partisipasi guru masih rendah; (2) dana kurang; dan (3) belum adanya kebijakan yang mengharuskan guru PAI untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan KKG PAI. Terdapat kebutuhan guru-guru PAI yang belum terakomodasi yaitu kebutuhan workshop penulisan KTI baik untuk sertifikasi maupun untuk kenaikan pangkat. Selain itu kebutuhan workshop lanjutan tentang pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran.

Data awal yang diperoleh bahwa KKG PAI Kecamatan Tambaksari telah memiliki program kerja tahunan, dan ada jadwal kegiatan. Program kerja tersebut disusun atas masukan beberapa koordinator guru PAI di setiap gugus. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu setelah jam pelajaran efektif selesai bertempat secara bergilir di sekolah anggota gugus masing-masing. Evaluasi program selama ini yang dilakukan adalah evaluasi proses, yakni mencocokkan rencana kegiatan dengan realisasinya. Evaluasi hasil masih dilakukan berdasarkan laporan kepala sekolah dan prestasi guru PAI dalam mengikuti berbagai lomba guru teladan. Hambatan yang dominan terletak pada kurangnya dana baik untuk mendatangkan nara sumber dari luar, untuk studi banding, maupun untuk pengadaan sarana laboratorium pembelajaran sebagai tempat praktikum inovasi pembelajaran bagi guru-guru PAI anggota gugus. Selain dana, hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi guru PAI mengikuti kegiatan KKG. Ada kebutuhan guru PAI yang belum terakomodasi, yakni kebutuhan guru mendapat pembinaan dalam melakukan penelitian tindakan kelas dan menulis laporan hasil penelitian sampai dapat dimuat dalam jurnal kependidikan yang terakreditasi dan kebutuhan guru PAI untuk workshop lanjutan tentang pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran.

Temuan awal tersebut perlu ditindaklanjuti, apakah benar program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari tersebut belum didasarkan atas kebutuhan riil semua guru PAI dalam meningkatkan profesionalismenya?. Bagaimana cara menemukan kebutuhan-kebutuhan guru PAI tersebut? Sudahkah evaluasi proses sebagaimana dikemukakan dilakukan secara benar? Mengapa evaluasi hasil hanya dilakukan berdasarkan laporan koordinator KKG PAI di setiap gugus? Apakah betul dana menjadi penghambat pelaksanaan program, khususnya untuk mendatangkan nara sumber, untuk studi banding, maupun untuk membuat laboratorium pembelajaran? Bagaimana mereka menggali dana selama ini? Mengapa pembinaan untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dibutuhkan oleh mayoritas guru anggota gugus belum terlaksana? Untuk itulah diperlukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya digunakan untuk merekonstruksi program KKG PAI Kecamatan Tambaksari. Untuk itulah penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini akan membahas *pertama*, Bagaimana program KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017; *kedua*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan program KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017; *ketiga*, Bagaimana efektifitas pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017; *keempat*, Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017; *kelima*, Bagaimana konstruksi profil ideal program KKG PAI menurut pihak-pihak yang berkepentingan dengan KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017, *keenam*, bagaimana rekonstruksi program KKG PAI di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) secara mendalam tentang fenomena atau gejala sosial melalui perspektif emik (*emic view*) dan perspektif etik (*etic view*). Dengan pemahaman fenomena atau gejala sosial secara mendalam dan holistic melalui studi tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk teori baru yang dalam konteks penelitian ini berupa program KKG Pendidikan Agama Islam (PAI) di

Kecamatan Tambaksari Surabaya yang dipandang efektif. Silverman dan Marvasti⁹ mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pengkajian kondisi nyata sebagai substansi dan proses. Sehingga data yang diperlukan merupakan data empiris lapangan yang diperoleh dengan berbagai cara.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, menurut Yin¹⁰ dapat mengidentifikasi 3 (tiga) luaran yang dihasilkan, yaitu: (1) dapat mengeksplorasi kasus secara lebih mendalam berdasarkan data-data yang akurat; (2) mendeskripsikan hasil lebih rinci sehingga mudah untuk dimengerti orang lain; (3) dapat dijadikan 'jalan' untuk menguji teori.

Subjek penelitian ini adalah koordinator gugus KKG PAI di enam Gugus di Kecamatan Tambaksari Surabaya, pembina, dan pengurus KKG. Pemilihan subjek penelitian yang dijadikan informan didasarkan atas kelayakan subjek dalam memberikan informasi guna menjawab rumusan masalah penelitian ini. Jumlah informan ditetapkan: (1) Pembina Teknis KKG PAI, 1 orang; (2) Ketua I KKG PAI, 1 orang; (3) Sekretaris KKG PAI, 1 orang; (4) Koordinator Gugus/Kelurahan 6 orang dimana setiap Gugus 1 orang. Dengan demikian jumlah informan 9 orang. Jika data yang diperoleh dari informan sudah mencapai titik kejenuhan atau sudah *redundance*, jumlah informan tersebut dipandang telah memadai, namun jika masih ada variasi data yang cukup menarik, jumlah informan masih perlu ditambah.

Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya dilakukan simultan dengan reduksi data sehingga data yang diperoleh langsung dipilah dan dipilih sesuai dengan kategori yang dibutuhkan, dan kemudian dianalisis pemaknaan sesuai dengan kenyataan tersebut. Lebih detail Yin¹¹, (2011) membuat Siklus 5 (lima) tahap dalam analisis data studi kasus, yaitu: (1) Kompilasi (*compiling*), (2) Pembongkaran (*disassembling*), (3) Menyusun ulang (*reassembling*), (4) Menafsirkan (*interpreting*), dan (5) penarikan kesimpulan (*concluding*).

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan : memperpanjang masa observasi/keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

⁹David Silverman & Amir Marvasti.. *Doing Qualitative Research: A Comprehensive Guide*. 1 edition. SAGE Publications, Inc, 2008), 93.

¹⁰Robert K Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (London: The Guilford Press, 2011), 86.

¹¹ *Ibid.*, 90.

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi antar sumber, triangulasi antar metode, dan triangulasi antar waktu.

Diskusi Hasil Penelitian

Program Kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari Tahun 2017

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari tahun 2017 tidak memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan baik tujuan umum maupun tujuan setiap program. Hal ini jelas tidak sejalan dengan standar pengembangan program KKG/MGMP yang menegaskan bahwa perumusan program KKG/MGMP dimulai dari menyusun Visi, Misi, Tujuan, sampai kalender kegiatan.¹²

Dilihat dari sasarannya dalam program KKG PAI Kecamatan Tambaksari tahun 2007 dijumpai ada siswa menjadi sasaran program KKG. Misalnya program PHBI Lomba Islami memperingati Maulid Nabi, dimana sasarannya adalah siswa. Juga pesantren Romadhon baik tingkat sekolah, Kecamatan maupun Kota sasarannya adalah siswa. Hal ini menunjukkan bahwa program KKG yang ada kurang fokus untuk kepentingan peningkatan profesionalisme guru PAI yang menjadi anggotanya. Padahal KKG didirikan tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru. Sebagaimana dikemukakan dalam standar pengembangan KKG/MGMP, bahwa:

“KKG/MGMP bertujuan untuk¹³:

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memak-simalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
- b. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.

¹² Depdiknas. *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP* (Jakarta, Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008), 7.

¹³ *Ibid.*, 4-5

- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
- e. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
- f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermindari peningkatan hasil belajar peserta didik.
- g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP.”

Fokus KKG PAI bagi peningkatan kompetensi guru PAI juga telah dibuktikan oleh Abdul Gani¹⁴ yang membuktikan bahwa KKG PAI dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Hasil penelitiannya: (1) Pelaksanaan kegiatan KKG PAI Kecamatan Payaraman sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan sudah disusun sistematis dan sesuai dengan permasalahan, (2) Kedisiplinan guru PAI dalam mengikuti kegiatan KKG sudah baik, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta (guru-guru) dalam kegiatan KKG PAI. Selanjutnya keaktifan guru terlihat dalam mengajukan pertanyaan, merespon pertanyaan guru lain, saling berbagi informasi dengan interaksi banyak arah, yaitu peserta dengan peserta, peserta dengan tutor dan sesama tutor, 3) Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri gugus sudah baik yaitu program pembelajarannya disiapkan dengan baik, selanjutnya pembelajaran dan program penilaian berpedoman pada persiapan yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas berarti siswa bukanlah sasaran langsung aktivitas KKG PAI, tetapi sasaran tidak langsung. Artinya, jika program KKG dapat meningkatkan kompetensi guru, maka kualitas pembelajaran akan meningkat dan hal itu

¹⁴ AbdulGani. “Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Paedagogik Guru Di Sekolah Dasar Negeri Gugus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.” Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung: Perpustakaan UPI, 2014), iv. t.d.

berarti siswa akan dapat mengambil manfaatnya dari program KKG secara tidak langsung.

Mekanisme Pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari sebagai berikut:

- a. Setiap jabatan ada rincian pekerjaannya masing-masing (*job description*).
- b. Pembina, selaku Pengawas PAI melakukan pembinaan secara insidental baik ke pengurus maupun ke anggota pada saat ada kegiatan atau sewaktu-waktu jika Pengawas sedang melakukan kepengawasannya di KKG PAI Kecamatan Tambaksari.
- c. Pengurus harian menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai job yang disepakati dalam rapat anggota.
- d. Ketua Umum mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada anggota diakhir masa jabatannya.
- e. Ketua-ketua bidang melaksanakan program kerjanya masing-masing dikoordinasi oleh Ketua KKG supaya tidak berbenturan pelaksanaannya. Ketua bidang bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- f. Koordinator gugus bertanggungjawab kepada Ketua umum.

Mekanisme pelaksanaan program KKG tergantung pada AD dan ART KKG masing-masing. Hal itu berarti tidak ada kebijakan khusus tentang mekanisme KKG, tergantung AD dan ART hasil rapat anggota. Namun demikian aktivitas suatu organisasi jika tidak dievaluasi maka tidak mungkin pimpinan organisasi dapat mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada anggota dan pihak-pihak terkait, yakni pengawas, dan MKKS. Oleh karena itu belum dilakukannya evaluasi hasil di KKG PAI Kecamatan Tambaksari merupakan kesenjangan utama antara harapan dan realita yang harus diperbaiki dalam rekonstruksi program KKG.

Efektivitas Pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perumusan program kerja, pengurus KKG PAI Kecamatan Tambaksari belum merumuskan tujuan program, baik tujuan umum maupun tujuan setiap program. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan hanyalah evaluasi proses, yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, terlaksana, belum

terlaksana atau tidak terlaksana karena sesuatu. Evaluasi hasil belum dilakukan, oleh karena itu efektifitas setiap kegiatan KKG dalam mencapai tujuannya belum dapat dilakukan, yang berarti tingkat keefektifan program, baik secara keseluruhan maupun setiap program belum dapat diketahui.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor Pendukung pelaksanaan program kerja KKG PAI di Kecamatan Tambaksari antara lain: (1) adanya kemauan pengurus dan anggota untuk maju; (2) adanya kemampuan dan keterbukaan pengurus dalam mengelola organisasi KKG PAI; dan (3) adanya pembinaan dari Pengawas yang dilakukan secara kontinyu. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1): Dana sangat minim; (2) Jam mengajar guru sangat padat sehingga sulit mengatur waktu untuk kegiatan KKG PAI; (3) rendahnya motivasi beberapa guru untuk mengikuti kegiatan KKG, terutama guru senior; dan (4) sarana-prasarana KKG PAI hampir seluruhnya pinjam ke sekolah, belum milik sendiri sehingga kurang leluasa dalam mempergunakannya.

Fakhrudin¹⁵ dalam penelitiannya “Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Semarang” menemukan di antaranya bahwa dukungan pemerintah dalam memberdayakan KKG dipersepsi termasuk kategori kurang dengan besaran 68,57 persen. Bentuk dukungan diharapkan berupa dana operasional (71,43%) dengan alasan kondisi sarana dan prasarana di sekolah untuk melaksanakan kegiatan KKG dalam kerangka pengembangan kurikulum termasuk kurang memadai.

Temuan Fakhrudin tersebut juga ada kesamaannya dengan kondisi KKG PAI Kecamatan Tambaksari, bahwa dukungan pemerintah memang dirasakan kurang, dukungan yang diharapkan adalah dana operasional dan atau sarana. Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena memang anggarannya tidak mencukup.

¹⁵ Fakhrudin. “Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Semarang”. Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Semarang: Perpustakaan Unes, 2010), v, t.d.

Program Ideal KKG PAI Kecamatan Tambaksari Menurut Informan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurus KKG PAI Kecamatan Tambaksari sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan program KKG yakni sebagai berikut.

- a. Dalam proses perumusan program harus meminta masukan semua guru anggota melalui angket, sebab jika suara guru diperhitungkan mereka akan mudah diajak aktif mengikuti kegiatan KKG PAI.
- b. Program harus dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, baik dalam membuat RPP, membuat soal, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, dan melakukan evaluasi serta menganalisis hasil ulangan/ujian.
- c. Program harus mengacu pada kebutuhan guru dan perkembangan tuntutan keprofesionalan guru sehingga KKG PAI benar-benar bermanfaat bagi guru, jika tidak guru banyak yang enggan untuk aktif di KKG.
- d. Pilih program yang diprioritaskan oleh kebanyakan guru anggota, seperti keterampilan membuat PTK yang selama ini kebanyakan guru masih mengalami kesulitan.
- e. Perumusan program diawali dengan visi-misi program, tujuan program, dan jadwal kegiatan.
- f. Sebaiknya penyusunan program kerja KKG PAI mengacu pada standar pengembangan program KKG yang dirumuskan oleh Kemendiknas.
- g. Program perlu dievaluasi, baik proses kegiatan maupun efektivitas kegiatan dalam mencapai target hasil.

Program KKG terdiri dari program rutin dan program pengembangan. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) Diskusi permasalahan pembelajaran; (b) Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran; (c) Analisis kurikulum; (d) Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran; dan (e) Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional. Sedangkan program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan berikut: (a) Penelitian; (b) Penulisan Karya Tulis Ilmiah; (c) Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel; (d) KKG berjenjang (diklat berjenjang); (e) Penerbitan jurnal KKG; (f) Penyusunan *website* KKG; (g) evaluasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran setiap awal tahun

pelajaran; (h) studi banding ke sekolah dan atau KKG yang lebih maju; dan (i) pelatihan-pelatihan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru.

Sebagai referensi untuk rekonstruksi program KKG kiranya temuan Manap Somantri dan Sa'adah Ridwan¹⁶ ini dapat menjadi rujukan. Ia meneliti dengan tema "Revitalisasi KKG Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru SD/MI Di Kabupaten Seluma". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan KKG model *lesson study* efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran secara PAIKEM. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, serta aktivitas dan hasil belajar siswa. Secara rinci hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan KKG model *lesson study* di Kabupaten Seluma dapat meningkatkan: (1) kualitas proses pembelajaran yang berfokus pada siswa; (2) meningkatkan kesadaran guru untuk bersikap terbuka dan refleksi diri melalui pelaksanaan *open class* dalam *lesson study*; (3) meningkatkan minat guru-guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah khususnya untuk belajar bersama; (4) meningkatkan keharmonisan kerja sama antara pengawas sekolah dengan guru-guru dan atau dengan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam implementasi PAKEM; (5) meningkatkan kualitas proses pembinaan pengawas sekolah terhadap guru-guru di sekolah binaan; dan (6) meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam analisis kebutuhan diklat.

Wartoni¹⁷ dalam studinya berjudul "Evaluasi Keefektifan KKG Pada Program Bermutu" di Kabupaten Batang, Jawa Tengah". Ia menemukan bahwa: (1) kondisi KKG di kabupaten Batang, Jawa Tengah dikategorikan baik, (2) kondisi sarana dan prasarana dikategorikan baik dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan KKG di kabupaten Batang Jawa Tengah, (3) kondisi organisasi dikategorikan baik dan program telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, (4) peran kelompok kerja guru di kabupaten Batang Jawa Tengah dalam meningkatkan dan mengembangkan profesional guru dikategorikan baik, dan (5) produk KKG menunjukkan bahwa kompetensi guru

¹⁶ ManapSumantri & Sa'adah Ridwan. "Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru SD/MI di Kabupaten Seluma". *Jurnal Kependidikan Triadik* 4, No.1 (2011).

¹⁷ Wartoni. "Evaluasi keefektifan kelompok kerja guru (KKG) pada program BERMUTU (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah." Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta: Perpustakaan UNY, 2013), vii, t.d.

dan hasil belajar siswa meningkat. Penelitian tersebut mempertegas bahwa evaluasi hasil pelaksanaan program KKG memang harus dilakukan sehingga tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan program dapat dilakukan dengan efektif.

Rekonstruksi Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi program KKG PAI di atas dapat diketahui kesenjangan antara program KKG yang ada dan efektivitas pelaksanaannya dengan program KKG yang ideal menurut informan. Kesenjangan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Belum dilakukannya analisis kebutuhan program KKG kepada seluruh anggota KKG, pengurus dan Pembina, tidak melalui perwakilan. Teknik yang digunakan dapat dengan kuesioner.
- b. Belum ada rumusan visi-misi, tujuan, sasaran dan jadwal kegiatan pelaksanaan program KKG PAI Kecamatan Tambaksari berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- c. Belum ada rumusan tujuan program baik secara umum maupun tujuan pada setiap program.
- d. Belum dilakukannya evaluasi keefektifan program KKG pada setiap program kerja sehingga tidak dapat diketahui dampak program terhadap peningkatan profesionalisme guru.
- e. Penyusunan program belum mengacu pada standar pengembangan KKG.

Berdasarkan beberapa kesenjangan tersebut maka dapat direkonstruksi pokok-pokok Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari yang masih perlu disempurnakan oleh pengurus. Pokok-pokok rekonstruksi program KKG tersebut meliputi rumusan Visi dan misi, Tujuan program, Program Rutin dan pengembangan dimana setiap program dirumuskan tujuan untuk memudahkan evaluasi keberhasilannya dan jadwal kegiatan pelaksanaannya. Dengan demikian untuk dapat merekonstruksi program KKG yang efektif sangat bergantung pada *goodwill* (kemauan baik) seluruh pengurus dan anggota KKG. Pengalaman baik di KKG lain dan rambu-rambu pengelolaan KKG dari Kemendiknas kiranya menjadi rujukan yang sangat penting untuk menghasilkan program KKG yang efektif bagi peningkatan profesional guru PAI.

Kesimpulan

Pertama, Program Kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari Tahun 2017, dirumuskan setiap awal tahun (Januari). Proses perumusannya dilakukan melalui musyawarah segenap pengurus, pembina, dan perwakilan gugus. Program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari tahun 2017 dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepengurusan organisasi KKG-nya, meliputi program yang menjadi tanggungjawab: Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang. Program Bidang Dakwah meliputi: PHBI, pesantren romadhon, pembinaan mental, bakti sosial, kuliah tujuh menit sebelum rapat, dan dakwah seni. Bidang Pelatihan dan Pengembangan meliputi: peningkatan kualitas SDM guru, organisasi, dan kaderisasi. Bidang character building meliputi istigotsah, tahfidz Quran, Baksos, dan Khotmil Qur'an. Bidang penggalian dana dan kesejahteraan meliputi: iuran wajib, sosial anggota, wira usaha, dan kesejahteraan anggota. Bidang humas meliputi: koordinasi dengan pihak terkait, pengefektifsn koordinasi anggota, dan sosialisasi program serta kegiatan.

Kedua, mekanisme pelaksanaan program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari sebagai berikut: (1) Setiap jabatan memiliki rincian pekerjaannya; (2) Pembina melakukan pembinaan secara insidental baik ke pengurus maupun ke anggota; (3) Pengurus harian menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai pekerjaannya yang disepakati dalam rapat anggota; (4) Ketua Umum mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada anggota setiap akhir tahun dan akhir masa jabatannya; (5) Ketua-ketua bidang bertanggungjawab kepada Ketua Umum; dan (6) Koordinator gugus bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Ketiga, efektivitas Pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari belum dapat diketahui karena pengurus KKG belum melakukan evaluasi hasil, namun demikian dilihat dari keterlaksanaan program hingga September 2017 sekitar 70% program dapat terlaksana. Program yang belum terlaksana antara lain: PHBI kirab semarak Muharram dan lomba Islami memperingati Maulid Nabi, Bhakti sosial ke Panti asuhan, pembuatan media pembelajaran android, Pelatihan baca tulis Quran, studi banding KKG, silaturahmi ke tokoh-tokoh. Tutor teman sebaya, dan pembentukan koperasi KKG.

Keempat, faktor-faktor Pendukung pelaksanaan program kerja KKG PAI di

Kecamatan Tambaksarin antara lain: (1) adanya kemauan pengurus dan anggota untuk maju; (2) adanya kemampuan dan keterbukaan pengurus dalam mengelola organisasi KKG PAI; dan (3) adanya pembinaan dari Pengawas yang dilakukan secara kontinyu. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1): Dana sangat minim; (2) Jam mengajar guru sangat padat sehingga sulit mengatur waktu untuk kegiatan KKG PAI; (3) sarana-prasarana masih sangat kurang; dan (4) kurangnya dukungan pemerintah, khususnya dukungan dana operasional.

Kelima, program Ideal KKG PAI Kecamatan Tambaksari seharusnya penyusunannya memenuhi prinsip-prinsip: (1) Dalam proses perumusan program harus meminta masukan semua guru; (2) Program harus dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar; (3) Program harus mengacu pada kebutuhan guru dan perkembangan tuntutan keprofesionalan guru; (4) Perumusan program diawali dengan visi-misi program, tujuan program, dan jadwal kegiatan; (5) Sebaiknya penyusunan program kerja KKG PAI mengacu pada standar pengembangan program KKG yang dirumuskan oleh Kemendiknas; dan (6) Program harus dievaluasi, baik proses maupun hasil. Program KKG terdiri dari program rutin dan program pengembangan. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) Diskusi permasalahan pembelajaran; (b) Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran; (c) Analisis kurikulum; (d) Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran; dan (e) Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional. Sedangkan program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan berikut: (a) Penelitian; (b) Penulisan Karya Tulis Ilmiah; (c) Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel; (d) KKG berjenjang (diklat berjenjang); (e) Penerbitan jurnal KKG; dan (f) Penyusunan *website* KKG.

Keenam, pokok-pokok rekonstruksi program KKG meliputi perlunya rumusan Visi dan misi, Tujuan program, Program Rutin dan pengembangan dimana setiap program dirumuskan tujuan untuk memudahkan evaluasi keberhasilannya dan jadwal kegiatan pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, *Professional Development for SD Teachers Through School Cluster, Teachers in Indonesia. Their Education, Training and Struggle Ince Colonial Era untul Reformation Era*. Directorate General of Primary and Secondary Education. Jakarta: Ministry of National Education of The Republic of Indonesia, 2004.
- Amiruddin. Tanpa Tahun."Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil melalui Dana Blockgrant di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam". Tidak Diterbitkan
- Bafadal, Ibrahim. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta : Bumi aksara, 2006.
- Creswell, JohnW. *Research Design: Qualitative & quantitative approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, .1994.
- Depdiknas. *Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*. Jakarta, Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008.
- Fakhruddin. "Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Semarang". *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2010.
- Gani, Abdul. "Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Paedagogik Guru Di Sekolah Dasar Negeri Gugus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir." Tesis, tidak diterbitkan, 2014,
- Hajaroh, Mami. Tanpa Tahun. *Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomonologi*. Dokumen dalam bentuk *soft-copy*, Tidak Diterbitkan.
- Indrawati. *Peningkatan Profesionalisme Guru dan Upaya Pengembangannya Melaui CPD/PKB*. Bandung: Forum Kreativitas dan Karya Inovasi PTK IPA, 2013.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1982 tentang Sekolah Dasar.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 079/C/K/I/1993 tentang pedoman pelaksanaan sistem pembinaan profesional guru melalui pembentukan gugus sekolah di Sekolah Dasar.

Koster, Wayan. 2006. *Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen*. Jakarta: tanpa penerbit
Pedoman Pelaksanaan KKG PAI pada SD. Kanwil Depag Jatim, 1996/1997

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Purnanda, Aan. 2013. "Pelaksanaan Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 1 No,1 (Oktober 2013).

Smith, Jonathan A., Flowers, Paul. and Larkin. Michael. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage, 2009.

Samana, A. *Profesionalisme keguruan*. Kanisius. Yogyakarta, 1994.

Soelaeman, M. I. *Penghampiran Fenomenologis Terhadap Pendidikan*. Bandung: IKIP Bandung, 1977.

Somantri, Manap & Ridwan, Sa'adah. "Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Guna Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Guru Sd/Mi Di Kabupaten Seluma". *Jurnal Kependidikan Triadik* 14, No.1 (April, 2011).

Sulipan. 2007. "Kegiatan Pengembangan Profesi Guru." Diakses dari <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>, tanggal 1 Juni 2015.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Waji D.P., Sholikhul. "Bentuk Penyiasatan Terhadap Keinginan Atasan (Kasus Partisipasi Warga Belajar dalam KKG pada Gugus Sekolah)". Tesis Pascasarjana Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Malang, 2003.

Wartoni. 2013. "Evaluasi keefektifan kelompok kerja guru (KKG) pada program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah." *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.